

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Sejenis

Sebelum membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai komunikasi Politik Caleg perempuan, penulis akan mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan dan dianggap memiliki kemiripan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam meneliti permasalahan yang akan diteliti oleh penulis

Penelitian terdahulu yang pertama ialah "*Pengaruh Budaya Patriarki, Pendidikan Politik dan Pendidikan Non Formal Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di DPRD Kota Bandung*". Yang diteliti Oleh Budi Utomo dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pendidikan politik serta pendidikan formal memberikan pengaruh sangat besar terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan politik terutama dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi politik.

Dalam realitasnya ternyata budaya patriarki di Kota Bandung masih cukup kuat melekat di masyarakat. Sekalipun pendidikan politik dan pendidikan formal kalangan perempuan sudah setara dengan kaum laki-laki, namun ternyata keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Bandung Masih sangat rendah.

Penelitian terdahulu yang kedua ialah “*Komunikasi Penampilan dan Karakter Persona Band Kuburan*”. Penelitinya adalah Mokh. Rizki Maulana dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2007, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Dramaturgi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kesan diperlukan untuk mendukung peran yang dimainkan. Ketika tampil di atas panggung, Denny mencoba menunjukkan dirinya sebagai musisi yang handal dan memiliki kemampuan bermusik yang baik. Denny melakukan pengelolaan kesan yang berbeda ketika menghadapi audiens band Kuburan maupun menghadapi muridnya.

Penelitian terdahulu yang kedua ialah yang berjudul “*Dramaturgi Tim Marketing Communication Harian Umum Pikiran Rakyat Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Civitas Academica Perguruan Tinggi Di Bandung*” Penulisnya adalah Irezky Indah Gemala dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2011. Skripsi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Dramaturgi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Irezky Indah Gemala ini yaitu bahwa penampilan, sikap, dan tingkah laku subjek penelitian akan berbeda-beda tergantung dengan situasi dimana individu berada.

Front stage, subjek penelitian melakukan suatu drama tertentu yang dibuat untuk memperlancar kerjasama antara publik internal dan publik eksternal. *Back stage* pada penelitian ini memperlihatkan bagaimana perilaku dan sikap para subjek penelitian cukup berbeda dengan *front stage*. Secara ringkas penelitian tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No		Budi Utomo	Mokh. Rizki Maulana	Irezky Indah Gemala	Ichsan Gumilar
1	Judul	Pengaruh Budaya Patriarki, Pendidikan Politik dan Pendidikan Non Formal Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di DPRD Kota Bandung.	Komunikasi Penampilan dan Karakter Personal Band Kuburan	Dramaturgi Tim Marketing Communication Harian Umum Pikiran Rakyat Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Civitas Academica Perguruan Tinggi di Bandung.	Komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Dramaturgi mengenai komunikasi politik caleg perempuan di dapil 2 Kab Sumedang)
2	Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif dengan pendekatan dramaturgi	Kualitatif dengan pendekatan dramaturgi	Kualitatif dengan pendekatan dramaturgi
3	Hasil Penelitian	Pendidikan politik serta pendidikan formal memberikan pengaruh sangat besar terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan politik terutama dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi politik.	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kesan diperlukan untuk mendukung peran yang dimainkan. Ketika tampil di atas panggung, Denny mencoba menunjukkan dirinya sebagai musisi yang handal dan memiliki kemampuan bermusik yang baik.	Hasil penelitian yaitu bahwa penampilan, sikap, dan tingkah laku subjek penelitian akan berbeda-beda tergantung dengan situasi dimana individu berada. <i>Front stage</i> , subjek penelitian melakukan suatu drama tertentu yang dibuat untuk memperlancar kerjasama antara publik internal dan publik eksternal. <i>Backstage</i> pada penelitian ini memperlihatkan bagaimana perilaku dan sikap para subjek penelitian cukup	Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif berhasil mengelola informasi dirinya dengan baik, selain itu mereka semua berhasil menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya dengan baik, rata rata caleg yang diteliti oleh penulis caleg dapat berkomunikasi dengan baik dengan tetangga disekitarnya
4	Perbedaan Penelitian	Peneliti disini meneliti tentang budaya patriarki, terhadap partisipasi caleg perempuan, sedangkan penulis meneliti komunikasi politik calegnya menjelang pileg.	Subjek penelitiannya yaitu Denny yang merupakan salah satu personil band Kuburan, sedangkan subjek penelitian penulis adalah enam orang caleg perempuan dari dapil 2	Irezky meneliti bagaimana dramaturgi Tim Marketing Communication Harian Umum Pikiran Rakyat sedangkan penulis Bagaimana caleg perempuan dalam menyiapkan dan menerapkan komunikasi politiknya.	Subjek dari penelitian penulis adalah caleg perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, dan objek dari penelitian ini adalah komunikasi politik caleg perempuan di dapil 2 kab Sumedang

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, penulis tidak menemukan kesamaan baik pada kesamaan subjek maupun kesamaan dalam fokus penelitian dengan apa yang penulis teliti yaitu, subjek penelitian penulis adalah tiga orang caleg perempuan yang berhasil menang dalam pileg yang berasal dari Dapil 2 dengan tiga orang subjek sebagai pembanding penelitian yaitu caleg yang berasal dari Dapil 2 namun tidak berhasil atau kalah dalam Pileg 2014 kemarin.

Dengan demikian, walaupun terdapat adanya persamaan dalam penggunaan tema, metode dan pendekatan yang diangkat, namun dengan adanya perbedaan subjek dan fokus penelitian, diharapkan akan memberikan suatu variasi yang menarik dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan dramaturgi, serta penulis berharap akan adanya peneliti-peneliti baru yang membuat penelitian yang lebih baik dari penelitian-penelitian yang pernah ada.

2.2 Komunikasi

Komunikasi selalu diperlukan dalam hidup manusia dan dalam banyak hal dalam aktivitas manusia pasti menyentuh komunikasi. Fenomena komunikasi terdapat dimana saja. Artinya komunikasi berada dimanapun dan kapan pun juga. Orang berkomunikasi adalah untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama.

Sama di sini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2007:9). Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Meskipun Kematian menghentikan peran kita sebagai penerima, kematian tidak menghentikan peran kita sebagai sumber. Pendeknya kita tidak dapat menyetop komunikasi. Kapan komunikasi mulai atau berakhir sulit dipastikan (Mulyana, 2007:77).

2.3 Politik

Dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan fenomena politik. Upaya pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui mekanisme perpajakan, lalu lintas, pendidikan, hingga urusan parkir merupakan cerminan dari fenomena politik. Di dalam mekanisme pengaturan tersebut tergambar kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa. Kewenangan tersebut terlihat dari adanya sanksi atau denda untuk sebuah ketidaktaatan pada mekanisme. Secara personal, sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Gejala inilah yang disebut sebagai gejala politik.

Ilmuwan politik Mark Roelofs menyatakan, "*Politic is talk*" atau lebih tepatnya kegiatan politik adalah berbicara, tetapi politik tidak sekedar pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik, tetapi hakikat pengalaman politik dan kondisi dasarnya adalah aktivitas komunikasi antarmanusia. Roelofs memandang bahwa komunikasi meliputi politik, jika orang dihadapkan pada konflik, mereka akan menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Dengan komunikasi orang berusaha menyelesaikan perselisihan mereka. Di kalangan mereka yang berkecimpung dalam politik praktis, hal semacam itu begitu tampak bagaimana para politisi mengadakan bergaining dengan lawan politiknya, atau terjadinya koalisi, ataupun konsensus, merupakan contoh-contoh bagaimana suatu konflik diturunkan ke dalam komunikasi (Subiako, 2012:17).

2.4 Komunikasi Politik

Pengertian komunikasi politik menurut Astrid S. Susanto (1975),

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Hikmat, 2010:36).

Selain dari pengertian komunikasi politik menurut Astrid tadi ada juga pengertian komunikasi politik dari Dan Nimmo (1978) yang berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.

Menurut Mark Roelofs dan Barn Lund,

Komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan pesan yang berisi pesan-pesan politik (isu politik, peristiwa politik dan perilaku politik individu-individu baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan) (Hikmat, 2010:36).

Pendapat lainnya yaitu dari menurut Dan Nimmo Komunikasi Politik (*political communication*) adalah:

Komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru (Nimmo, 2005:156).

Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka komunikasi politik dapat

diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pembangunan, komunikasi organisasi, perbedaan itu terletak pada isi pesan.

2.4.1 Budaya Politik Indonesia

Budaya Indonesia yang juga melekat menjadi budaya komunikasi politik selama ini harus dipahami melalui penelaahan sejarah yang panjang. Pengaruh agama (terutama Islam) dan kebudayaan Indonesia asli serta pertemuannya dengan kebudayaan barat, sangat besar pengaruhnya terhadap budaya politik, budaya komunikasi, dan budaya komunikasi politik Indonesia.

Harus diakui bahwa pendekatan kebudayaan oleh Daniel S Lev (1966) dipandang sering tidak mampu menjelaskan realita politik, karena cenderung mengabaikan faktor kekuasaan itu sendiri yang bersama-sama dengan kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap struktur kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan struktural dalam politik. Sebaliknya Albert Wijaya (1982) membuktikan pentingnya pendekatan kebudayaan dalam memahami kehidupan politik dalam pembangunan ekonomi. Banyak kegiatan politik dan program ekonomi yang secara struktural sudah terpenuhi, namun tidak dapat berjalan dengan baik, akibat adanya kendala yang bersifat kultural (Arifin, 2011:286).

Selain itu Budaya di Indonesia juga sangat berpengaruh yaitu Budaya *Patriarki*, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada dibawah laki-laki. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran domestik misalnya mengurus rumah tangga, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan penjaga moral (Romany, 2007:138).

2.4.2 Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Secara umum, bentuk-bentuk komunikasi yang disodorkan oleh para ilmuwan berbeda-beda, tetapi secara substansial sebetulnya sama. Terdapat beberapa bentuk komunikasi politik untuk mencapai tujuan politiknya yaitu:

- 1) Retorika. Berasal dari bahasa Yunani *rhetorica*, yang ebrarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan anatr persona.
- 2) Agitasi politik. Berasal dari bahasa latin, *agitare*. Artinya bergerak atau menggerakkan. Menurut Harbert Blumer, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.
- 3) Propaganda. Berasal dari bahasa latin, *propagare* (menanamkan tunas suatu tanaman) yang pada walnya sebagai bentuk kegiatan pneyebarannya agama katholik. Menurut W. Dobb, di Negara demokrasi propaganda dipahami sebagai usaha suatu individu atau kelompok yang bekepentingan untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan menggunakan sugesti; sedangkan menurut Harbert Blummer, suatu kampanye politik dengan sengaja mengajak, mempengaruhi guna menerima suatu pandangan, sentiment atau nilai.
- 4) *Public relations* (PR) politik. Tujuan pr politik adalah menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatifantara politikus, professional atau aktivis (komunikator) dan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).
- 5) Kampanye politik. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Meneurut Rogers dan Storey (1987), kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye politik berbeda dengan propaganda. Kampanye politik memiliki ciri-ciri: sumber melakukannya selalu jelas; waktu pelaksanaan terikat dan dibatasi; sifat gagasan terbuka untuk diperdebatkan khalayak; tujuannya tegas, variatif serta spesifik; modus penerimaan pesan sukarela dan persuasi; modus tindakannya diatur kaidah dan kode etik; mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.
- 6) Lobi politik. Istilah lobi sendiri sesungguhnya tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang, lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.

- 7) Lewat media massa. Menurut McLuhan, sebagai perluasan pancaindra manusia dan sebagai media pesan dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan serta citra politik; untuk khalayak yang lebih luas yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain (Arifin, 2011: 126 -153).

2.4.3 Fungsi Komunikasi Politik

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik menurut McNair (2003) memiliki lima fungsi dasar, yaitu:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Disini media berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*), dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.
- e. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa (Cangara, 2011:33).

Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi.

1. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentar-komentar politik.

2. Menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam penjaga dalam membantu terciptanya *good governance* yang transparansi dan akuntabilitas.

2.4.4 Proses dan unsur Komunikasi Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi adalah salah satu bentuk kegiatan umat manusia yang paling penting. Tidak ada manusia yang tidak menjalankan komunikasi karena komunikasi adalah lambang dari dinamika kehidupan di dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, komunikasi dilihat dalam pengertiannya yang umum dan luas, yakni hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi itu terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang diterima pihak lain yang menjadi sasarannya. Sehingga sedikit banyak memengaruhi sikap dan tingkah laku pihak yang dimaksud. Sebagai anggota masyarakat manusia melakukan hal ini secara terus menerus kadang-kadang bahkan tanpa sadar termasuk anggota masyarakat yang tidak mengerti arti konsep “komunikasi”. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa komunikasi adalah kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh semua anggota masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik. Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber (*source*) baik individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. Proses komunikasi politik merupakan rangkaian dari aktivitas penyampaian pesan politik sehingga diperoleh *feedback* dari penerima

pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul proses, model atau bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Menurut Bungin dalam buku Sosiologi Komunikasi ada beberapa tahap dalam proses komunikasi:

- a. *Ideation*, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Tahap pertama yang dilakukan sumber dalam proses komunikasi adalah *Ideation*, ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Seorang komunikator politik dapat memilih dan menciptakan pesan dengan menggunakan ide untuk mempengaruhi komunikannya.
- b. *Encoding*, dalam penciptaan suatu pesan, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Pesan adalah alat-alat dimana sumber mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tertulis ataupun perilaku non verbal, seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah, atau gambar-gambar.
- c. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah sandi (*encode*). Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah *channel* atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah tatap muka, radio dan telepon. Sedangkan untuk komunikasi tertulis adalah meliputi setiap materi yang tertulis maupun sebuah media yang mampu memproduksi kata-kata tertulis seperti televisi, kaset video, LCD, OHP. Sumber berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari gangguan ataupun hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima seperti yang dikehendaki.
- d. Mengalihkan perhatian kepada penerima pesan. Jika pesan itu bersifat lisan maka penerima perlu menjadi pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima melakukan *decoding*, yaitu memeberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman (*understanding*) merupakan kunci untuk melakukan *decoding* dan hanya terjadi dalam pikiran penerima. Akhirnya penerimalah yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana pula memeberikan respon terhadap pesan tersebut.
- e. Tahap akhir dalam proses komunikasi adalah *feedback* atau umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaiakannya kepada penerima. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat

berwujud kata-kata ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi (Bungin, 2007:255-256).

Seperti halnya dengan disiplin ilmu lainnya, maka komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri dari berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

a) Komunikator Politik

Seperti halnya perspektif komunikasi secara umum, komunikator politik dapat dikategorikan sebagai pemberi pesan politik. Pengkategorian ini berangkat dari perspektif umum bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik dari komunikator politik kepada komunikan politik. Oleh karena itu, ilmuwan yang mengkaji komunikasi politik memberikan istilah baku bagi pemberi pesan politik dengan istilah komunikator politik, seperti yang diungkapkan Ali (1999) untuk menilai lemahnya komunikasi politik di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi politik di Indonesia karena peran-peran komunikator politik di lembaga eksekutif yang terlalu dominan. Walaupun banyak juga ilmuwan politik yang tidak serta merta secara eksplisit menyebutkan komunikator politik dalam pendefinisian komunikasi politik. (Hikmat, 2010:42)

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan. Individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Komunikator politik dapat pula berupa Negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara.

Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijaksanaan komunikasi nasional. Karena ini sebagai komunikator politik dituntut berbagai persyaratan agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:

- 1) Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan,
- 2) Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung
- 3) Berorientasi kepada kepentingan Negara
- 4) Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelegence*)
- 5) Jauh dari sikap hipokrit (*Cognitive dissonance*)

Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak duduk pada struktur kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berkait dengan seluruh aspek kehidupan (Harun, 2006:11).

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya anggota DPR, MPR, Bupati, DPRD, fungsionaris partai politik, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan (Cangara, 2011:31).

b) Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun secara nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, pernyataan politik, berita yang berisi ulasan politik, dan pemerintahan, baligho, spanduk dan iklan politik (Cangara, 2011:31).

Komponen komunikasi yang terpenting setelah komunikator adalah pesan. Pesan sebagai fenomena yang berjalan pada rute perputarannya pada suatu saluran yang menghubungkan dua sumber atau penerima. Suatu pesan ditransformasikan pada titik-titik penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan merupakan pikiran atau ide pada suatu tempat pada sistem jaringan syaraf (*neurophysiological*) dari sumber atau penerima.

Effendy (2001) lebih memperjelas maksud pesan berbentuk pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, perasaan, dan lain-lain yang muncul di benak komunikator. “Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan dan lain-lain yang timbul di lubuk hati komunikator” (Hikmat, 2010:46).

Dalam proses komunikasi politik pun, pesan politik merupakan komponen terpenting. Mengacu kepada definisi komunikasi politik secara umum, pesan politik itu adalah pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan, pikiran, ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang mempengaruhi komunikasi politik.

Greber (1984) memandang pesan komunikasi politik dalam perspektif yang sangat luas. Menurutnya, pesan komunikasi politik dapat

berupa kebiasaan-kebiasaan (*costum*), aturan-aturan (*rules*), struktur dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Bahkan Muhtadi menegaskan bahwa pesan komunikasi politik itu adalah seluruh budaya politik yang berkembang di suatu negara (Muhtadi, 2008:11).

Isi (pesan-pesan) komunikasi merupakan produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasi ke dalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi akan terdiri dari:

- 1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan
- 2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung
- 3) Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integratif bagi penghuni sistem
- 4) Karakteristik yang menunjang identitas bangsa
- 5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa (Harun, 2006:12).

Dari ungkapan di atas memberi informasi bahwa komunikasi di dalam prosesnya berada pada struktur formal. Pesan-pesan komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran (Harun, 2006:12).

c) **Media Politik**

Media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak; surat kabar, tabloid. Media elektronik; film, radio, televisi. Media format kecil; leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin.

Media luar ruang (outdoor media); baliho, spanduk, reklame, bendera, pin, topi, kaos oblong, iklan mobil, gantungan kunci, payung dan lainnya (Cangara, 2011:32).

Dalam sistem politik yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat di dalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol, pemilihan media komunikasi harus didasarkan pada isi pesan yang ingin disampaikan, dan pemilihan media yang dimiliki oleh khalayak (Harun, 2006:13).

d) Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, ibu rumah tangga, pensiunan dan lainnya.

2.5 Paradigma Komunikasi Politik

a) Paradigma Mekanistik

Model *mekanistik* dalam komunikasi dan komunikasi politik adalah model yang paling lama dan paling banyak dianut sampai sekarang. Doktrin mekanisme yang diwarnai oleh cara berpikir kausal atau determinis sangat mudah dipahami, terutama dalam merumuskan

komunikasi sebagai proses. Berdasarkan doktrin itulah komunikasi dikonseptualisasi sebagai proses yang mekanistik di antara manusia. Sebagai proses yang mekanis, dalam komunikasi terdapat sesuatu (pesan) mengalir melintasi ruang dan waktu dari satu titik (sumber/penerima) kepada titik yang lain (sumber/penerima) secara simultan. Eksistensi empiriknya (lokusnya) terletak atau berada pada saluran. Justru itu model ini digambarkan oleh Fisher (1990) sebagai ban berjalan.

Dengan demikian, komunikasi sebagai suatu proses dipahami sebagai suatu mekanisme yang berjalan dari..., ke..., melintasi ruang dan waktu untuk satu titik ke titik lainnya. Komponen-komponen dalam model mekanistik ini sangat jelas, yaitu sumber/penerima, saluran, pesan/umpan balik, dan efek. Sesuai dengan doktrin mekanisme (idealisme mekanisme) yang berdasarkan cara berpikir sebab-akibat, titik berat kajiannya adalah pada efek.

Penerapan mekanisme dalam kajian komunikasi politik akan dengan mudah dilakukan. Secara mekanistik, dengan mudah Dan Nimmo (1990) menjabarkan formula Lasswell, bahwa dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur yang banyak dikenal, yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak dan efek politik. Model seperti itu sangat mendominasi kajian komunikasi politik, baik yang dikembangkan dalam kajian ilmu politik maupun dalam kajian ilmu komunikasi (Arifin, 2011:91-92).

b) Paradigma Psikologis

Paradigma *psikologis* dijelaskan oleh Arifin, komunikasi dikonseptualisasi sebagai penerimaan dan pengolahan informasi pada diri individu. Perspektif yang dipengaruhi secara sporadis (tidak mendalam sebagaimana pengaruh fisika terhadap perspektif mekanistik) oleh psikologi itu adalah mengadaptasi konsep S-R (*Stimulus-Respon*) dalam komunikasi. Dengan demikian, eksistensi empiriknya (lokusnya) bukan lagi terletak pada saluran sebagaimana dalam perspektif mekanistik, melainkan terletak pada diri individu penerima (komunikasi), yaitu pada kepala individu yang dinamakan “filter konseptual”. Filter itu merupakan keadaan internal dari organisasi manusia, dan secara esensial merupakan konsep “kotak hitam” (*black box*). Walaupun filter itu tidak dapat diamati secara langsung, namun sangat mempengaruhi setiap peristiwa komunikasi (2011: 95).

Dengan demikian, komunikasi dalam model psikologi merupakan masukan dan luaran stimuli yang ditambahkan dan diseleksi dari stimuli yang terdapat dalam lingkungan informasi. Justru itu, situasi komunikasi ditandai oleh medan stimulus yang terstruktur dan derajat kesengajaan dipihak komunikasi. Jelaslah, bahwa situasi komunikatif dari perspektif psikologis berbeda dari situasi S-R lainnya yang tidak mengandung eksistensi fenomena komunikasi (Arifin, 2011: 95).

c) Paradigma Interaksional

Paradigma Interaksional menurut Fisher (1990) komunikasi dikonseptualisasi sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu. Walaupun interaksi itu sering juga disamakan dengan komunikasi terutama komunikasi dua-arah, namun dalam paradigma ini, konsep itu tidak berlaku. Karakteristik utama dari paradigma interaksional, ialah penonjolan nilai individu di atas segala pengaruh lainnya karena manusia dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, serta masyarakat dan buah pikiran. Justru itu, setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia. Itulah sebabnya perspektif ini, dipandang paling manusiawi di antara semua perspektif komunikasi yang ada.

Paradigma interaksional dalam komunikasi amat sering dinyatakan sebagai komunikasi dialogis atau komunikasi yang dipandang sebagai dialog. Hal itu merupakan reaksi humanitas terhadap model mekanisme yang pada dasarnya bersifat monolog. Dalam komunikasi yang monolog individu yang berkomunikasi direndahkan harkatnya menjadi pemberi atau penerima pesan, baik aktif maupun pasif karena mereka telah ditentukan nasibnya sebagai yang memperlakukan. Sebaliknya dalam dialog manusia yang berkomunikasi, diangkat derajatnya ke posisi yang mulia karena dialog mengandung arti pengungkapan diri dan pengembangan saling pengertian bersama-sama dengan pengembangan diri melalui interaksi sosial.

Paradigma interaksional yang memberi penekanan pada faktor manusiawi, sangat tepat dan relevan diterapkan dalam komunikasi politik yang *demokratis*. Konsep demokrasi yang memandang manusia sebagai makhluk rasional dan menunjang hak-hak asasi manusia serta mengembangkan prinsip-prinsip *egaliter* dan *populis* sangat sesuai dengan paradigma interaksional. Komunikasi politik menghendaki adanya partisipasi politik yang tinggi misalnya, sudah seyogianya menerapkan komunikasi yang bersifat dialogis (Arifin, 2011: 97-98).

d) Paradigma Pragmatis

Revolusi yang juga belum selesai terjadi dalam perspektif yang relatif paling baru dan sedang dalam proses perkembangan, yaitu perspektif *pragmatis*. Sesuai dengan namanya, perspektif ini memusatkan perhatian pada *pragma* atau *tindakan*. Jika dalam model interaksi tindakan yang diamati adalah tindakan sosial dalam konteks kultural, maka dalam model pragmatis tindakan yang diamati, menurut Fisher (1990) adalah tindakan atau “perilaku yang berurutan” dalam “konteks waktu” dalam “sebuah sistem sosial”. Tindakan atau perilaku tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, atau perilaku

Dalam paradigma yang relatif baru paling baru itu, kita tidak lagi bicara tentang pesan, umpan balik, komunikator, komunikan dan media sebagaimana dikenal dalam perspektif mekanistik yang hingga hari ini masih mendominasi kajian komunikasi dan komunikasi politik di

Indonesia. Melainkan kita berbicara tentang ucapan-ucapan yang terpola dan pola tindakan atau pola perilaku dalam waktu tertentu.

Dalam paradigma pragmatis itu dapat juga terjadi bahwa “tidak ada komunikasi non verbal adalah sesungguhnya komunikasi (tindakan atau perilaku). Misalnya seorang tokoh politik yang diam atau mengangguk saja (nonverbal) dalam menanggapi isu penting sesungguhnya adalah komunikasi politik dalam perspektif pragmatis (tindakan atau perilaku yang mengandung kemungkinan) (Arifin, 2011: 99-101).

2.6 Teori Gender

Dalam pembahasan mengenai gender, dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu *teori nurture* dan *teori nature*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan *teori equilibrium*. Sasongko 2009 menjelaskan ke tiga teori tersebut yaitu:

2.6.1 Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis).

Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Karena itu aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat, seperti manajer, DPR, Parpol. Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut (Sasongko, 2009: 17).

2.6.2 Teori Nature

Menurut teori *nature* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga tidak dapat berubah dan bersifat *universal*. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Talcott Parsons dan Bales 1979 berpendapat bahwa:

“Keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga“(Sasongko, 2009: 19).

Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender, maka beralih ke teori *nature*. Agregat ketidakadilan gender dalam

berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.

2.6.3 Teori Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan *equilibrium* yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain (Sasongko, 2009: 20).

2.7 Konsep Dramaturgi dari Goffman

Erving Goffman selama ini kita kenal sebagai seorang sosiolog yang memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teatris. Dalam konsepnya ini, Goffman memfokuskan pada ungkapan yang tersirat, yakni suatu ungkapan yang lebih bersifat teatris, kontekstual, nonverbal, dan tidak bersifat intensional. Dalam analisis ini, orang akan berusaha memahami makna untuk mendapatkan kesan dari berbagai tindakan orang lain, baik yang dipancarkan dari

mimik wajah, isyarat, dan kualitas tindakan. Pendekatan dramaturgi merupakan suatu pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama dipanggung. Pendekatan ini mencerminkan wawasan yang dulu dikemukakan oleh *Shakespeare* bahwa dunia itu merupakan suatu panggung dan manusia hanyalah sekedar pemain-pemain saja di atas panggung ini, masing-masing masuk ke dalam panggung memainkan suatu peran tertentu atau membawakan lakon dan akhirnya keluar.

Fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, apa yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Setiap orang yang membuat “pertunjukan” dalam penampilannya di hadapan khalayak akan berusaha menampilkan suatu kesan yang sangat berbeda. Lewat imajinasi pula seseorang berusaha mempersepsi pikiran orang lain melalui suatu gambaran tentang penampilan, perilaku, tujuan, perbuatan, karakter, dan sebagainya saat berinteraksi dengan orang lain. Intinya adalah ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan akan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Seseorang biasanya tidak selalu memunculkan karakter dirinya yang sebenarnya. Karena ia ingin agar orang lain dapat menilai dirinya sesuai dengan karakter yang diinginkannya, maka ia akan memainkan peran yang diinginkannya.

Karena begitu banyaknya peran yang dimainkan seseorang, tidak semua peran itu dimainkan dengan intensitas yang sama. Hal ini disebut sebagai jarak peran. Menurut Goffman, jarak peran yang merujuk kepada sejauh mana aktor memisahkan diri mereka dari peran yang mereka pegang (Mulyana, 2010:118).

Seseorang aktor harus bisa memisahkan perannya antara peran yang satu dengan peran yang lain. Namun dalam menampilkan diri di hadapan orang lain, seseorang tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkannya selalu akan ada gangguan. Untuk itulah pendekatan dramaturgi juga berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Meskipun begitu, kesalahan-kesalahan dalam menampilkan citra diri jarang terjadi dan bahkan pada kebanyakan “pertunjukan” tersebut akan berhasil dengan baik.

2.7.1 Panggung Depan dan Panggung Belakang

Perspektif dramaturgi mengibaratkan kehidupan ini sebagai teater, interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung, yang menampilkan peran-peran yang dimainkan para aktor. Untuk memainkan peran tersebut, sang aktor menggunakan bahasa verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu serta menggunakan atribut-atribut tertentu. Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi wilayah depan (*front region*) dan wilayah belakang (*back region*). Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka seperti sedang memainkan suatu peran di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya, wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan.

Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan (*front stage*) yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara

bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan (Mulyana, 2010:114).

Goffman membagi panggung depan ini menjadi dua: front pribadi (*personal front*) dan setting, yakni situasi fisik yang harus ada ketika aktor harus melakukan pertunjukkan. Tanpa setting, aktor biasanya tidak dapat melakukan pertunjukkan, misalnya seorang pemain basket memerlukan lapangan basket dan seorang supir memerlukan mobil. *Front* pribadi terdiri dari alat-alat yang dapat dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting. *Personal front* mencakup juga bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor, misalnya berbicara sopan, pengucapan istilah-istilah asing, intonasi, postur tubuh, ekspresi wajah, pakaian, penampakan usia, ciri-ciri fisik dan lain sebagainya. Ciri yang relatif tetap seperti ciri fisik (termasuk ras) dan usia biasanya sulit di sembunyikan atau diubah, namun aktor sering memanipulasinya dengan menekankannya atau melembutkannya, misalnya menghitamkan kembali rambut beruban dengan cat rambut, mencukur bulu-bulu di wajah hingga wajah menjadi nampak klimis dan tampak lebih muda atau sebaliknya memelihara jenggot dan kumis untuk memberi kesan lebih berwibawa atau lebih tua.

Berbeda dengan panggung depan yang ditampilkannya, panggung belakang memungkinkan pembicaraan dengan menggunakan kata-kata kasar atau tidak senonoh, duduk dan berdiri dengan sembrono, merokok, berpakaian seenaknya, menggunakan dialek atau bahasa daerah, mengomel, berteriak bersendawa atau buang angin dan lain sebagainya. Panggung belakang biasanya

berbatasan dengan panggung depan dan tersembunyi dari pandangan khalayak. Ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukkan.

Goffman mengakui bahwa panggung depan cenderung terlembagakan alias mewakili kepentingan kelompok atau organisasi. Sering ketika aktor sedang melaksanakan perannya, peran tersebut telah ditetapkan oleh lembaga tempat individu bernaung. Artinya, panggung depan dipilih atau diciptakan. Goffman berpendapat bahwa karena umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukkan mereka di panggung depan, mereka merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukkan mereka. Goffman juga menyatakan bahwa orang tidak selamanya ingin menunjukkan peran formalnya dalam panggung depannya. Individu mungkin memainkan suatu peran, meskipun individu enggan akan peran tersebut atau menunjukkan keengganan untuk memainkannya, padahal individu senang bukan kepalang akan peran tersebut. Misalnya, seorang dosen senior bercelana jeans dengan kemeja tangan panjang digulung, atau bermain musik di hadapan mahasiswa, meskipun mungkin saja ada mahasiswa yang tidak menyukai penampilan dosen senior tersebut.

Menurut Goffman dalam Mulyana (2010) ketika orang melakukan hal semacam itu, mereka tidak bermaksud membebaskan diri sama sekali dari peran sosial atau identitas mereka yang formal itu, namun karena ada peran sosial dan identitas lain yang menguntungkan mereka. Sebagai contoh, selebritis papan atas ataupun tidak, jarang berdandan sedemikian rupa agar tidak dikenal khalayak, sehingga mereka leluasa untuk melakukan apapun yang mereka sukai.